

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 13 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

NAILUR ROHMAH
05120099



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

Februari, 2010

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 13 MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.I)*

Oleh:

Nailur Rohmah
05120099



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

Februari, 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 13 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:
Nailur Rohmah
05120099

Telah Disetujui Tanggal:
4 Januari 2010

Dosen Pembimbing,

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Moh. Padil, M.Pd.I
NIP. 196512051994031 003

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP NEGERI 13 MALANG**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh
Nailur Rohmah (05120099)
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Februari 2010
Dan Telah Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Pada Tanggal 20 Februari 2010

Panitia Ujian

Ketua Sidang/Pembimbing,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031 001

Dr. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd
NIP. 196905262000031 003

Penguji Utama,

Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196504031998031 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031 001

Dr. H. M. Zainuddin, MA
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Nailur Rohmah
Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Malang, 4 Januari 2010

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nailur Rohmah
NIM : 05120099
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*

maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. H. M. Zainuddin, MA
NIP. 196205071995031 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 4 Januari 2010

Nailur Rohmah

HALAMAN MOTTO

.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^ج

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam
ku persembahkan karya ini kepada;*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan, dan
memberikan bantuan material, dan imaterial sehingga penulis bisa
melanjutkan keperguruan tinggi dan bisa menyelesaikan
penulisan skripsi ini*

*Adikku Mariana Afifah yang selalu memberi
dukungan dalam kehidupanku*

*Semua guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah memberikan
ilmunya dengan penuh ikhlas dan kesabaran*

*Sahabat-sahabatku angkatan 2005 UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang terima kasih atas motivasi dan dukungannya
Berjuanglah selalu untuk meraih cita-cita dan
masa depan kalian, semoga sukses selalu*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 13 MALANG”**.

Shalawat dan salam, barokah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang yakni *Dinul Islam*.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta pengorbanannya baik berupa materiil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Drs. Moh. Padil, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Muhammad Nurfakih, M.Ag selaku Kepala SMP Negeri 13 Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin.
7. Segenap guru SMP Negeri 13 Malang beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan skripsi ini.
8. Teman-temanku yang turut membantu dan memotivasi penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran

yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin

Malang, 4 Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Komite Sekolah	17
1. Pengertian komite sekolah.....	17
2. Kedudukan komite sekolah	20
3. Tujuan komite sekolah	21
4. Peran dan fungsi komite sekolah	23
5. Struktur organisasi komite sekolah.....	30
C. Mutu Pendidikan Agama Islam	34
1. Pengertian mutu pendidikan agama Islam.....	34
2. Ciri-ciri mutu pendidikan agama Islam.....	49
3. Indikator mutu pendidikan agama Islam	57
D. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam	62

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	67
B. Kehadiran Peneliti	68
C. Lokasi Penelitian	70
D. Sumber Data	70
E. Prosedur Pengumpulan Data	71
F. Analisis Data	74
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	75
H. Tahap-Tahap Penelitian	76

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek	79
1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 13 Malang.....	79
2. Letak geografis SMP Negeri 13 Malang	80
3. Visi dan misi SMP Negeri 13 Malang	80
4. Struktur organisasi SMP Negeri 13 Malang.....	83
5. Sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang	85
6. Struktur organisasi komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang	85
7. Keadaan guru di SMP Negeri 13 Malang	87
8. Keadaan siswa-siswi di SMP Negeri 13 Malang.....	88
9. Keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 13 Malang	88
B. Paparan Data.....	89
1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang	89
2. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang	99

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.....	114
B. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.....	117

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran-Saran 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran III : Surat Keterangan Dari SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran IV : Bukti Konsultasi
- Lampiran V : Instrumen Penelitian
- Lampiran VI : Profil SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran VII : Denah SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran VIII : Struktur Organisasi Sekolah dan Komite Sekolah di SMP
Negeri 13 Malang
- Lampiran IX : Jumlah Siswa-siswi SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran X : Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran XI : Jumlah Guru dan Karyawan SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran XII : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 13 Malang Tentang
Pengesahan Dewan Sekolah/Komite Sekolah di SMP
Negeri 13 Malang
- Lampiran XIII : Daftar Nama Anggota Dewan Sekolah/Komite Sekolah di
SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran XIV : Notula Rapat Wali Siswa SMP Negeri 13 Malang
- Lampiran XV : Daftar Nilai Siswa Kelas VII Bidang Studi Pendidikan
Agama Islam
- Lampiran XVI : Daftar Dokumentasi SMP Negeri 13 Malang

ABSTRAK

Nailur Rohmah, 2010. *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dr. H. M. Zainuddin, MA

Kata Kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan Agama Islam

Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Padahal peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk menampung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.

Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam, maka pihak SMP Negeri 13 Malang berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsetakan keterlibatan komite sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, meliputi: 1). bagaimana mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang?, dan 2). bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang, dan 2) mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu, untuk keabsahan datanya dicek menggunakan teknik *triangulasi*, menggunakan bahan refrensi, dan *member check*.

Hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari segi *input*, proses dan *outputnya*. **Kedua**, Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang, meliputi: 1) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*):

Komite SMP Negeri 13 Malang sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, melakukan pelebaran mushalla, pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. 2) Sebagai pendukung (*supporting agency*): peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang ini berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan fikiran. 3) Sebagai pengontrol (*controlling agency*): komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. 4) sebagai mediator: Komite sekolah di SMP Negeri 13 ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah, aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan. Selain itu, pihak sekolah juga selalu mendapat *support* dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan agama Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.¹

¹ Umeidi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001), hlm. 1

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.³

Keenam masalah tersebut merupakan imbas daripada sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tidak menentu. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum yang tidak sesuai dengan

² Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm.6

³ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

perkembangan zaman. Artinya, dalam sebuah proses pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai *ilahiyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan) dalam berperilaku interaksi dengan individu (peserta didik), keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu di kaji dan diperjuangkan.

Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga penyelenggara pendidikannya seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan

didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.⁴

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.⁵ Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-

⁴ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006), hlm. 3

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 11.

2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.⁶

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁷

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan

⁶ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 92

⁷ Kepmendiknas SK No. 044/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 122.

pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.⁸

Adapun tujuan komite sekolah yaitu 1). mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di satuan pendidikan.⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 89-90

⁹ Ibid, hlm. 90

manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.¹⁰ Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di setiap satuan pendidikan.

SMP Negeri 13 Malang merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama menjangkit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan tak terkecuali pendidikan agama Islam. Lembaga ini dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun SMP Negeri 13 Malang mengikutsertakan pihak komite sekolah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*).

Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam, maka pihak SMP Negeri 13 Malang berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsetakan keterlibatan komite sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik.

¹⁰ Hamzah B. Uno, *op. cit.*, hlm. 93

Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu tak terkecuali pendidikan agama Islam.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik membahas masalah dengan judul “*Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 13 Malang*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Mengetahui mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.
2. Mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar, dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
3. Secara institusional, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam melalui peran komite sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar dari apa yang telah ditentukan semula, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah tertentu. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP 13 Malang. Dalam hal ini ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

- a. *Input*,
 - b. Proses, dan
 - c. *Output*.
2. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang. Komite sekolah keberadaannya berperan sebagai berikut:
- a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan,
 - b) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
 - c) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,
 - d) Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan persepsi dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa definisi operasional, antara lain:

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹ Peran merupakan bentuk pengaruh yang disebabkan oleh seseorang terhadap sesuatu untuk pengembangan dan perubahan sesuatu tersebut dalam suatu peristiwa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mempunyai peran dan fungsinya sendiri-sendiri bagi sesuatu yang lain. Begitu pula masyarakat, *stakeholder* pendidikan, kepala sekolah maupun komite sekolah, juga mempunyai peran dalam upaya pengembangan pendidikan.

2. Komite sekolah

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan.¹² Pengadaan komite sekolah dalam suatu lembaga pendidikan adalah wujud nyata dari otonomi pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan, baik itu masyarakat maupun yang terlibat langsung dalam suatu pendidikan. Komite sekolah dimanfaatkan perannya dalam usaha membantu kelancaran proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan dasar maupun menengah. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan peran komite sekolah guna membantu negara dalam mengentaskan manusia Indonesia dari kebodohan.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1996), hal. 751.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 5

3. Mutu pendidikan agama Islam

Mutu adalah baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).¹³ Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.¹⁴

Adapun pendidikan agama Islam adalah upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.¹⁵

Oleh karena itu, yang dimaksud mutu pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah keberhasilan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan memahami materi pendidikan agama Islam yang ditandai dengan pencapaian nilai akademik yang memuaskan, kemampuan *outputnya* untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan mampu merealisasikan pendidikan agama Islam seoptimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

¹³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 505

¹⁴ Umeidi, *op. cit.*, hlm. 25.

¹⁵ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 7-8

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan ini memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam enam bab yang disusun secara sistematis. Pendahuluan penulis letakkan pada bab pertama yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Kajian pustaka penulis letakkan pada bab dua yang membahas tentang landasan teori yang terdiri dari empat sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama yaitu tentang penelitian terdahulu. Sub pokok bahasan yang kedua memahami tentang komite sekolah yang terdiri dari: pengertian komite sekolah, kedudukan komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah, serta struktur organisasi komite sekolah. Sub pokok bahasan yang ketiga tentang mutu pendidikan agama Islam yang terdiri dari: pengertian mutu pendidikan agama Islam, ciri-ciri mutu pendidikan agama Islam, dan indikator mutu pendidikan agama Islam. Dan sub pokok bahasan yang keempat mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

Metode penelitian penulis letakkan pada bab tiga yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Pada bab empat dipaparkan hasil penelitian yang penulis laksanakan yang meliputi dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama penulis membahas tentang latar belakang obyek penelitian yang meliputi: sejarah

berdirinya SMP Negeri 13 Malang, letak geografis SMP Negeri 13 Malang, visi dan misi SMP Negeri 13 Malang, struktur organisasi SMP Negeri 13 Malang, sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang, struktur organisasi komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang, keadaan guru di SMP Negeri 13 Malang, keadaan siswa-siswi di SMP Negeri 13 Malang, serta keadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 13 Malang. Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua penulis membahas tentang paparan data yang terdiri dari: mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

Bab lima penulis paparkan pembahasan hasil penelitian, yang mana pada bab ini, penulis mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan pada bab enam penulis paparkan penutup sebagai bab terakhir dalam skripsi, bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan dan saran-saran konstruktif dan inovatif dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat tema mengenai masalah komite sekolah bukanlah tema baru dalam dunia penelitian. Paling tidak ada penelitian terdahulu yang pernah mengangkat tema ini. Penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh M. Abdul Rofiq Roziqi, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: strategi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Surya Buana Malang, diantaranya yaitu:

- 1) Dari aspek manajemennya, komite sekolah menjembatani dengan perlu adanya perlibatan masyarakat untuk ikut rasa memiliki terhadap perkembangan lembaga dalam artian masyarakat diberi keluasaan untuk urun rembung,
- 2) Dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), komite sekolah telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: mengadakan study banding, mendelegasikan seminar dan pelatihan, memberikan tips pendidikan ringan,
- 3) Dari aspek kurikulum, komite sekolah secara kultural berupaya menjembatani ketika peserta didik berada di rumah, dengan jalan selalu menghimbau pada wali murid untuk terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa

yang telah didapat dari sekolah, agar ada keseimbangan antara di sekolah dan di rumah.

- 4) Dari aspek sarana dan prasarana, komite sekolah berupaya memaksimalkan dana yang berasal dari infaq wali murid untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana di sekolah guna menunjang proses belajar mengajar jadi tidak tergantung pada instansi pemerintah karena sadar bahwa sekolahnya adalah swasta.¹⁶

Annisah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: peran komite madrasah dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar meliputi pemberi pertimbangan, komite madrasah berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, peranan komite sekolah selanjutnya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di lingkungan madrasah. Dalam perwujudan peranan komite madrasah dalam pengembangan madrasah meliputi: pengembangan di bidang sarana prasarana, dan pengembangan dibidang keuangan”.¹⁷

Sementara Yuliati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: strategi pimpinan madrasah dalam meningkatkan peran komite madrasah di MTsN Malang 1 dapat diklasifikasikan menjadi 8 macam: 1) memilih orang-orang yang tepat menjadi pengurus komite madrasah, 2) membagi beban kerja yang merata sehingga pengurus komite dapat bekerja secara maksimal, 3) menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan adanya keterbukaan (transparan) dalam

¹⁶ Abdul Rofiq Roziqi, “*Strategi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007, hlm. 114-115

¹⁷ Annisah, “*Peranan Komite Sekolah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007, hlm. 104

bekerjasama, 4) saling menjaga amanah dalam menjalankan tugas serta ada kemauan untuk berbenah diri dan bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, 5) memberi point/nilai bagi yang berprestasi, 6) menjalin rasa kekeluargaan, dan 7) melibatkan komite dalam setiap kegiatan yang ada di madrasah.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis di sini akan mengadakan penelitian tentang peran komite sekolah. Adapun yang membedakan dengan skripsi yang terdahulu, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada mutu pendidikan agama Islam, yang mana pada penelitian terdahulu lebih ditekankan pada kualitas pendidikan secara umum dan pengembangan madrasah Tsanamiyah. Jadi disini peneliti akan membahas tentang “Peran komite sekolah sebagai dewan yang memberi pertimbangan (*advisory council*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang”.

B. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Menurut Sanapiah Faisal (1981) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai patner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.¹⁹ Untuk

¹⁸ Yulianti, “*Strategi Pimpinan Madrasah Dalam Meningkatkan Peran Komite Madrasah DI MTsN Malang I, Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007, hlm.80

¹⁹ Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 148

itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan.

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara *stakeholder* pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewedahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewedahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.²⁰

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa:

Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²¹

Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama

²⁰ Hasbullah, *op.cit.*, hlm. 89-90

²¹ Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 29

lain yang disepakati bersama.²² Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).

2. Kedudukan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah.²³

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
2. Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa sekolah/madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu

²² Hasbullah, *op.cit.*, hlm. 90

²³ Sukirno, *op. cit.*, hlm. 2

penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.²⁴

3. Tujuan Komite Sekolah

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan²⁵

Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan

²⁴ Khaeruddin, dkk. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II, 2007), hlm. 249

²⁵ Sukirno, *Op. cit.*, hlm. 3

pendidikan dan komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.²⁶

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para *stakeholder* agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan tak terkecuali mutu pendidikan agama Islam. Disamping itu, badan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Keberadaan komite sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.²⁷

²⁶ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 90

²⁷ Khaeruddin, dkk. *Op. cit.*, hlm. 250

4. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.²⁸

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan,

²⁸ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 91

arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan²⁹

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.³⁰

Komite sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - Kebijakan pendidikan;
 - Program Pendidikan;
 - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *op. cit.*, hlm. 29

³⁰ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 92-93

- Kriteria kinerja satuan;
 - Kriteria tenaga kependidikan;
 - Kriteria fasilitas pendidikan.
2. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*), indikator kinerjanya yaitu:
- Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
 - Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
 - Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
 - Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) indikator kinerjanya yaitu:
- Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
 - Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;
 - Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.
4. Peran komite sekolah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu:
- Melakukan kerja sama dengan masyarakat;
 - Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.³¹

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan *akuntabilitas* sebagai berikut:

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.³²

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita paparkan tugas dan fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
- 2) Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- 3) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah.
- 4) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana strategi pengembangan sekolah/madrasah.
- 5) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah/madrasah termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M.

³¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 93-94

³² Khaeruddin, *dkk. op. cit.*, hlm. 252

- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah/madrasah.
- 7) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).
- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- 9) Mengelola kontribusi masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan sekolah/madrasah.
- 10) Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- 11) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).
- 12) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.

- 13) Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara proporsional.
- 14) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar (sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- 15) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- 16) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.
- 17) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.

Selain peran yang disebutkan diatas, peran nyata yang dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau *partner* bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

5. Struktur Organisasi Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jika

dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara.³³

a. Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa (BPD) dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).³⁴

Anggota komite sekolah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

1. Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah.
3. Unsur yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan.
4. Badan Pertimbangan Desa dan lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (sebanyak-banyaknya berjumlah 3 orang).

³³ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 99

³⁴ *Ibid*, hlm. 100

5. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.³⁵

b. Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Yang menangani urusan administrasi komite sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
3. Jika diperlukan komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi AD dan ART.
2. Pengurus komite sekolah menyusun program-program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.

³⁵ Khaeruddin, dkk. *op. cit.*, hlm. 252

3. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
4. Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.³⁶

Pengurus dari anggota komite sekolah yang telah dipilih secara demokratis harus segera menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Oleh karena itu, pada umumnya ada pembentukan tim kecil yang diberi tugas untuk menyusun rancangannya kemudian dibahas dalam rapat-rapat pleno komite sekolah. Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/202, Anggaran Dasar (AD) komite sekolah sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan,
2. Dasar, tujuan dan kegiatan,
3. Keanggotaan dan kepengurusan,
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus,
5. Keuangan,
6. Mekanisme kerja-kerja dan rapat-rapat, dan
7. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) sekurang-kurangnya memuat:

1. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus,

³⁶ Ibid., hlm. 254

2. Rincian tugas komite sekolah,
3. Mekanisme rapat,
4. Kerjasama dengan pihak lain, dan
5. Ketentuan penutup.

C. Mutu Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian mutu pendidikan agama Islam

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan terus berubah dan berkembang. Sejalan dengan hal itu, mutu produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.³⁷

Secara etimologis, mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangibile*. Menurut Juran (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi *availability*,

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata. Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen* (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hlm. 8

delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Davis (1995) “kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.”³⁸

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.³⁹

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru-termasuk guru BP-, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya). *Input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat

³⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 554-555

³⁹ Umeidi, *op. cit.*, hlm. 25

berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan *input*. Makin tinggi kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu *input* tersebut.⁴⁰

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan *input* sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

⁴⁰ Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 52

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁴¹

Sudarwan Danim menyatakan bahwa hasil (*output*) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler.⁴² Disamping itu, mutu keluaran (*output*) juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 53

⁴² Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen sekolah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 53-54

moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

Menurut Ace Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.⁴³ Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mampu menanamkan dan menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.⁴⁴

Sebagaimana pengertian mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan agama Islam juga mempunyai pengertian yang sama. Hanya saja

⁴³ Ace Suryadi, *Indikator mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992), hlm. 159

⁴⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

mutu pendidikan agama Islam memberikan penekanan yang lebih besar kepada kualitas muatan pendidikan agama Islam.

Dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

a) Siswa

Dalam kaitannya dengan pendidikan, peserta didik merupakan faktor atau komponen penting dalam pendidikan, oleh karena itu pembinaan terhadap anak harus dilaksanakan secara terus-menerus ke arah kematangan dan kedewasaan. Bisa dikatakan hampir semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Upaya itu akan optimal jika siswa itu sendiri secara aktif berupaya mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan kondisi agar siswa dapat mengembangkan diri secara optimal.

Sebagai manusia, peserta memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, yaitu:

- a. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
- b. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik.
- c. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan,

jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya), serta perbedaan individual.⁴⁵

Berkenaan dengan siswa, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

- a. Siswa harus diperhatikan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
- b. Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
- c. Pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
- d. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.⁴⁶

b) Pendidik

Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap anak didik, dalam proses pendidikan guru memegang peran penting setelah orang tua di rumah. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, dan

⁴⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 52

⁴⁶ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 121

melatih anak didik mencapai kedewasaan.⁴⁷ Oleh karena itu, kualitas seorang guru khususnya para guru pendidikan agama Islam tersebut harus ditingkatkan. Usaha peningkatan kualitas guru ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

1. Absensi dan kedisiplinan guru

Hal ini sangat menentukan kualitas pendidikan guru, karena absensi dan kedisiplinan guru sangat berpengaruh demi kelancaran proses belajar-mengajar. Jika guru jarang hadir atau tidak disiplin maka hal itu akan menghambat proses belajar-mengajar dan akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas. Akan tetapi jika guru selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat dalam mengajar, maka hal inilah yang akan menjadi pemacu semangat peserta didik dalam belajar. Dan bagi setiap guru, hendaknya selalu mempunyai komitmen sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2. Membentuk *teacher meeting*

Teacher meeting dapat diartikan pertemuan atau rapat guru yang merupakan salah satu teknik supervisi dalam rangka usaha memperbaiki situasi belajar-mengajar di sekolah.⁴⁸

Ada beberapa tujuan dari *teacher meeting* ini, diantaranya yaitu:

⁴⁷ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP* (Jakarta: Persada Press, 2009), hlm. 47

⁴⁸ Dirawat, dkk. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 132

1. Menyusun pandangan-pandangan guru tentang konsep umum arti pendidikan dan fungsi sekolah dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dimana merupakan tanggung jawab mereka bersama,
2. Mendorong guru-guru untuk menerima dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta mendorong kearah pertumbuhan mereka,
3. Menyatukan pendapat-pendapat tentang metode-metode kerja yang akan membawa mereka bersama ke arah pertumbuhan mereka,
4. Membantu guru-guru baik secara individu bersama-sama untuk menemukan dan menyadari kebutuhan-kebutuhan mereka, menganalisa problema-problema mereka, pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.⁴⁹

Anjuran untuk melakukan rapat atau musyawarah ini, sesuai dengan ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Asy-syuro ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

⁴⁹ Ibid, hlm. 132-133

*musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”.*⁵⁰

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Islam memerintahkan agar dalam menyelesaikan masalah hendaknya dengan musyawarah (rapat).

3. Mengikuti penataran

Penataran merupakan salah satu sarana yang tepat untuk meningkatkan kualitas guru dalam hal kemampuan profesionalisme. Seperti yang diungkapkan Djumhur dan Mochammad Surya dalam bukunya yang berjudul bimbingan dan penyuluhan di Sekolah: “Penataran adalah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing”.⁵¹

Kegiatan penataran itu dimaksudkan untuk:

- a. Mempertinggi mutu petugas dalam bidang profesinya masing-masing
- b. Meningkatkan efisiensi kerja menuju ke arah tercapainya hasil

Adapun penataran yang diikuti oleh guru adalah penataran yang diadakan oleh Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional maupun lembaga atau instansi-instansi lainnya. Dalam setiap penataran tidak semua guru dapat mengikutinya, tetapi hanya guru-guru yang bersangkutan (terkait dengan bidangnya), dan diharapkan setelah

⁵⁰ *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 789

⁵¹ Djumhur dan Mochammad Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1975), hlm. 115

mengikuti penataran itu, guru dan peserta lainnya harus disosialisasikan kepada guru dan pegawai lainnya.

4. Mengikuti kursus pendidikan

Dengan mengikuti kursus akan menambah wawasan dan pengetahuan guru. Hal ini juga akan meningkatkan profesionalisme guru lebih berkualitas. Kegiatan kursus dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

5. Mengadakan studi tour

Kegiatan semacam ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran tertentu dan yang sejenis dan berkumpul bersama untuk mempelajari masalah dari pelajaran tersebut, atau sejumlah ilmu yang lain. Lokasi yang dipilih biasanya berkaitan dengan tempat hiburan tempat-tempat yang bernilai sejarah, sehingga pelaksanaannya selalu menarik dan menambah semangat.

c) **Sarana dan Prasarana**

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi,

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁵²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

d) Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensi, menasihati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik.⁵³

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian penting dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dengan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

⁵² E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 49

⁵³ Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain:

1. Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah⁵⁴

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dan menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mesti berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat. Baik dalam bentuk kapasitas hubungan dinas, maupun hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar kedinasan. Kegiatan humas pada dasarnya tidak cukup hanya menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah yang bersangkutan, tetapi juga harus mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁴ Ibid., hlm. 50-51

- 1) Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan;
- 2) Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama;
- 3) Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan;
- 4) Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.

Dengan demikian, pada dasarnya humas tidak hanya bersifat publisitas belaka, tetapi jauh dari itu bagaimana sekolah membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain berupa *networking*, di mana kerjasama itu untuk kondisi sekarang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.⁵⁵

e) **Keuangan**

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas memerlukan tersedianya dana dan sarana yang lengkap dan canggih atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani. Namun dana yang banyak dan fasilitas yang lengkap dan mahal tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya pendidikan berkualitas, hal itu akan sangat tergantung pada sistem pengelolaan serta kemampuan atau keahlian dan moral para petugas yang bertanggung jawab.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan

⁵⁵ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 126

pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁵⁶

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak.

Paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam pembiayaan pendidikan, yaitu:

- 1) *Financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh,
- 2) *Budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan
- 3) *Accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.⁵⁷

2. Ciri-ciri Mutu Pendidikan Agama Islam

⁵⁶ E. Mulyasa, *op. cit.* hlm. 47

⁵⁷ E. Mulyasa, *op. cit.*, hlm. 48

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan agama Islam. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut.⁵⁸

Visi dan misi mutu difokuskan pada lima hal, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan kostumer

Dalam sebuah sekolah yang bermutu, setiap orang menjadi kostumer dan sebagai pemasok sekaligus. Secara khusus kostumer sekolah adalah siswa dan keluarganya, merekalah yang akan memetik manfaat dari hasil proses sebuah lembaga pendidikan (sekolah). Sedangkan dalam kajian umum kostumer sekolah itu ada dua, yaitu internal meliputi orang tua, siswa, guru, administrator, staff dan dewan sekolah yang berada dalam sistem pendidikan. Dan kostumer eksternal yaitu, masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang

⁵⁸ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata langkah penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 10

berada diluar organisasi namun memanfaatkan *output* dari proses pendidikan.

b. Keterlibatan total komunitas dalam program

Setiap orang juga harus terlibat dan berpartisipasi dalam rangka menuju ke arah transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab semua pihak.

c. Pengukuran nilai tambah pendidikan

Pengukuran ini justru yang seringkali gagal dilakukan di sekolah. Secara tradisional ukuran mutu atas keluarga sekolah adalah prestasi siswa, dan ukuran dasarnya adalah ujian. Bilamana hasil ujian bertambah baik, maka mutu pendidikan pun membaik.

d. Memandang pendidikan sebagai suatu sistem

Pendidikan mesti dipandang sebagai suatu sistem, ini merupakan konsep yang amat sulit dipahami oleh para profesional pendidikan. Umpamanya orang bekerja dalam bidang pendidikan memulai perbaikan sistem tanpa mengembangkan pemahaman yang penuh atas cara sistem tersebut bekerja. Hanya dengan memandang pendidikan sebagai sebuah sistem maka para profesor pendidikan dapat mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.

e. Perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat *output* pendidikan menjadi lebih baik.

Mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki menurut filosofi manajemen lama "kalau belum rusak jangan diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru "bila tidak rusak perbaikilah, karena bila tidak dilakukan anda maka orang lain yang akan melakukan". Inilah konsep perbaikan berkelanjutan.⁵⁹

Pendidikan dikatakan bermutu apabila pendidikan itu mampu membentuk lulusannya agar memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai calon pemimpin di muka bumi ini. Ciri-ciri pendidikan bermutu terutama pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- b. Pendidikan yang memiliki investasi pada sumber daya manusianya.
- c. Pendidikan yang memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik maupun tenaga administratif.
- d. Pendidikan yang mengelola atau memberlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 11-14

- e. Pendidikan yang mempunyai kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- f. Pendidikan yang mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
- g. Pendidikan yang mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- h. Pendidikan yang memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
- i. Pendidikan yang memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- j. Pendidikan yang memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- k. Pendidikan yang memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- l. Pendidikan yang menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.⁶⁰

Dalam peningkatan mutu pendidikan janganlah mengabaikan *input*, proses, dan *output*. Karena untuk mengukur apakah pendidikan itu bermutu atau tidak dapat di lihat dari ketiga hal tersebut. Pendidikan dikatakan bermutu apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, bisa menghasilkan

⁶⁰ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 54-55

output yang diharapkan sekolah. *Output* sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah.

Kedua, proses, sekolah yang bermutu pada umumnya memiliki sejumlah ciri proses sebagai berikut:

- a. Proses belajar-mengajar yang efektifitasnya tinggi.
- b. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat.
- c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
- d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
- e. Sekolah yang memiliki budaya mutu.
- f. Sekolah yang mempunyai *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis.
- g. Sekolah yang memiliki kewenangan dan kemandirian.
- h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
- i. Sekolah yang memiliki keterbukaan (transparansi manajemen).
- j. Sekolah yang mempunyai kemampuan untuk berubah (psikologis dan fisik).
- k. Sekolah yang melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
- l. Sekolah yang responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan.
- m. Sekolah yang memiliki komunikasi yang baik, terutama antar warga sekolah dan sekolah-masyarakat.
- n. Sekolah yang memiliki akuntabilitas..

Ketiga, *input* pendidikan yang bermutu pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas;
- b. Sumberdaya tersedia dan siap;
- c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
- d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi;
- e. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa);
- f. Memiliki *input* manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Adapun *input* manajemen yang dimaksud meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksana rencana, ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya system pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai.⁶¹

Menurut Abdul Rachman Shaleh, ciri-ciri pendidikan yang bermutu adalah sebagai berikut:⁶²

1) *Input*

- a. Kebijakan mutu dan harapan.
- b. Sumber daya (kesediaan masyarakat).
- c. Berorientasi siswa.
- d. Manajemen (pembagian tugas, perencanaan, kendali mutu efisiensi).

2) *Proses*

- a. Pembelajaran, berorientasi:

⁶¹ Umaedi, *op. cit.*, hlm. 12-20

⁶² Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 246-267

1. *Learning to know.*
 2. *Learning to do.*
 3. *Learning to be.*
 4. *Learning to live together.*
- b. Kepemimpinan yang kuat/demokratis.
1. Kemampuan manajerial.
 2. Kemampuan memobilisasi.
 3. Memiliki otonomi luas.
- c. Lingkungan: aman, nyaman, manusiawi.
- d. Pengelolaan tenaga yang efektif.
1. Perencanaan.
 2. Pengembangan.
 3. Penilaian.
 4. Imbal jasa.
- e. Memiliki budaya mutu (kerja sama, merasa memiliki, mau berubah, mau meningkatkan diri, terbuka).
- f. Tim kerja (kompak, cerdas, dinamis).
- g. Partisipasi masyarakat tinggi.
- h. Memiliki akuntabilitas.
1. Laporan prestasi.
 2. Respons/tanggapan masyarakat.

3) *Output*

- a. Prestasi Akademis:

1. NEM
 2. STTB
 3. Taraf serap
 4. Lomba karya ilmiah
 5. Lomba keagamaan
- b. Prestasi Non Akademis:
1. Olahraga
 2. Kerapian/ketertiban
 3. Kepramukaan
 4. Kebersihan
 5. Toleransi
 6. Ketulusan
 7. Kesenian
 8. Disiplin
 9. Kerajinan
 10. Solidaritas
 11. Silaturahmi
 12. Dan lain-lain.⁶³

⁶³ Ibid, hlm. 248.

3. Indikator Mutu Pendidikan Agama Islam

Ada beberapa indikator yang menunjukkan pendidikan agama Islam yang bermutu, diantaranya yaitu:

- a) Secara akademik, lulusan pendidikan tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
- b) Secara moral, lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya,
- c) Secara individual, lulusan pendidikan tersebut semakin meningkatkan ketakwaannya, yaitu manusia yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya,
- d) Secara sosial, lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya,
- e) Secara kultural, ia mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosional), dan psikomotorik (praktis) kultural dapat terbina secara seimbang.⁶⁴

Umaedi (1999:5) mengemukakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, ada beberapa indikator pendidikan agama Islam yang bermutu, antara lain:

- a) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,
- b) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai,
- c) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,

⁶⁴ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm.172

- d) Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi,
- e) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan kebutuhan dan IPTEK,
- f) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu,
- g) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat.⁶⁵

Menurut Suryadi dan Tilaar, indikator pendidikan yang bermutu adalah sebagai berikut:

- a. Faktor *input* yang meliputi:
 - 1) Besar kecilnya sekolah,
 - 2) Faktor guru yang berkualitas,
 - 3) Faktor buku belajar,
 - 4) Faktor situasi belajar yang kondusif,
 - 5) Kurikulum,
 - 6) Manajemen sekolah yang efektif.
- b. Faktor *output* yang meliputi:
 - 1) Partisipasi sekolah (dalam prestasi),
 - 2) Efisiensi internal proses belajar,
 - 3) Prestasi belajar kognitif,

⁶⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 306

4) Prestasi belajar efektif.⁶⁶

Djoyonegoro (1998) berpendapat bahwa, sebagaimana dikutip oleh Sugeng Listyo Prabowo, pendidikan agama Islam yang bermutu, memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Memiliki prestasi akademik dan non akademik di atas rata-rata sekolah di daerah tersebut,
2. Sarana dan prasarana serta layanan yang lebih lengkap,
3. Sistem belajar yang lebih baik dan waktu belajar yang lebih panjang,
4. Melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar,
5. Mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, yang dibuktikan dengan jumlah pendaftar dibanding kapasitas kelas,
6. Biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah di sekitarnya.⁶⁷

Hal yang hampir sama, berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang bermutu tersebut ditegaskan dalam Depdikbud (1994), sebagaimana dikutip oleh Sugeng Listyo Prabowo, yang meliputi:

1. Masukan (*input*) yaitu siswa yang diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah: a). prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik, b). skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreativitas, c). tes fisik, jika diperlukan,

⁶⁶ Ace Suryadi dan Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 108

⁶⁷ Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 64

2. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler,
3. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi yang nyata baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial psikologis,
4. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan intensif tambahan bagi guru berupa uang maupun fasilitas lainnya seperti perubahan,
5. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya,
6. Kurun waktu belajar lebih lama dibanding sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Di komplek asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti: perpustakaan, olahraga, kesenian dan lain-lain yang diperlukan,
7. Proses belajar-mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) baik kepada siswa, lembaga, maupun masyarakat,

8. Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya,
9. Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan diluar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreatifitas dan disiplin.⁶⁸

Mencermati indikator-indikator di atas, terlihat bahwa pendidikan yang bermutu tak terkecuali pendidikan agama Islam harus mencakup siswa, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, tenaga pendidik, kurikulum, proses belajar mengajar, program-program muatan lokal dan pengembangan diri, bahkan juga berkaitan dengan pembinaan yang panjang, artinya pendidikan yang bermutu harus mampu mengembangkan anak sepenuhnya. Namun demikian pendidikan yang bermutu tersebut harus dibuktikan dengan besarnya animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Kondisi ini juga menandakan bahwa sekolah yang bermutu bukan sekolah yang tidak diinginkan oleh masyarakat, karena bagaimanapun baiknya sekolah tersebut tetapi tidak diminati oleh masyarakat maka sekolah tersebut tidak akan memiliki nilai keunggulan (bermutu).⁶⁹

⁶⁸ Ibid, hlm. 66

⁶⁹ Ibid, hlm. 67

D. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (sekolah), khususnya pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam pendidikan agama Islam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁷⁰

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta

⁷⁰ Umaedi, *op. cit.*, hlm. 3

prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Dalam era otonomi pendidikan ini, keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif yang hanya menerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus aktif bermain, menentukan, membuat program bersama sekolah dan pemerintah. Orang tua hendaknya menyediakan waktu untuk berkunjung ke sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya.

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pengelolaan pendidikan, dan lembaga yang mewadahnya adalah dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah yang berkedudukan di satuan pendidikan (sekolah). Munculnya kedua lembaga ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan sebuah konsep pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan harus dikelola secara terbuka dan demokratis. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama

pendidikan agama Islam dinilai sangat tepat. Adapun peranan yang dijalankan oleh komite sekolah, yaitu:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁷¹

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah

⁷¹ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 92-93

kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

Komite sekolah juga berperan sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat *akuntabel* (dipertanggungjawabkan) kepada

masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarah dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang”. Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian kualitatif menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian *naturalistic*. Istilah “*naturalistic*” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami atau natural”.⁷²

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sebagai berikut ini:

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Hlm. 12

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁷³

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif.⁷⁴

Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena peneliti mengadakan penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan juga keadaan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 3.

⁷⁴ Ibid, hlm. 6

tersebut hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong “kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.”⁷⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, maka peneliti terjun langsung dan membaaur dalam komunitas subyek penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, peneliti realisasikan dengan mengamati dan berdialog secara langsung dengan beberapa pihak dan elemen yang berkaitan. Keterlibatan peneliti dengan komunitas subyek penelitian tersebut dilakukan sejak tanggal 12 September hingga tanggal 29 Desember. Akan tetapi, peneliti tidak serta merta ikut sepenuhnya dalam keseharian komunitas subyek penelitian. Peneliti hanya membaaur dan terlibat langsung di dalamnya sebanyak 23 kali. Dalam kesemua keterlibatan peneliti itu, peneliti di antranya melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Adapun observasi peneliti lakukan pada tanggal 12 September 2009, 14 September 2009, 16 September 2009, 25 September 2009, 27 September 2009, 30 September 2009, 06 Oktober 2009, 15 Oktober 2009, dan 24 November 2009. Wawancara peneliti lakukan pada tanggal 04 Oktober 2009, 07 Oktober 2009, 10 Oktober 2009, 15 Oktober 2009, dan 16 Oktober 2009. Kemudian studi dokumentasi peneliti lakukan pada tanggal 01 Desember 2009, 05 Desember

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 121

2009, 07 Desember 2009, 14 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 24 Desember 2009, 27 Desember 2009, dan 29 Desember 2009.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah di SMP Negeri 13 Malang yang berada di Jl. Sunan Ampel II Malang. peneliti memilih lokasi ini karena di SMP Negeri 13 komite sekolahnya sudah terbentuk yakni seiring dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan komite sekolah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Selain itu, di lokasi ini memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan observasi karena letaknya yang strategis dan merupakan salah satu sekolah unggulan di kota Malang.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁷⁶

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm.129

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁷ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner, sedang data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, yaitu: kepala SMP Negeri 13 Malang, Pengurus komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang yang terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara, serta guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 13 Malang yang berjumlah dua orang. Sedangkan yang dijadikan data sekunder adalah dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, seperti internet, majalah, dan buku-buku yang bersangkutan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain merupakan suatu proses data primer untuk keperluan penelitian. Serta merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan maka perlu adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 112

diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

1. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah Metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.⁷⁸

Metode ini merupakan metode untuk mencari data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷⁹ Metode wawancara dipergunakan apabila seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur. Menurut Suharsimi Arikunto, dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam.⁸⁰

Metode wawancara peneliti gunakan untuk mencari informasi tentang mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang serta peran komite

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* .(Yogyakarta: Andi Ofset, 1981), hlm. 193

⁸ Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 153

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 203

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

2. Metode Observasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan segala indera.⁸¹

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi SMP Negeri 13 Malang. Yaitu melihat-lihat lokasi penelitian, memperhatikan perilaku informan, mendengarkan pendapat informan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Margono, dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸²

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸³

⁸¹ Ibid, hlm. 229

⁸² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.181

⁸³ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 231

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan: sejarah berdirinya SMP Negeri 13 Malang, visi dan misinya, struktur organisasi dan kepengurusan sekolah, struktur komite sekolah, keadaan dan jumlah guru serta tenaga lainnya, keadaan dan jumlah siswanya, dan lain-lain.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁸⁴

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan yaitu hasil penelitian dengan dipilah-pilah

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 103

secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang. Deskriptif kualitatif adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada. Misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.⁸⁵

Triangulasi merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya hasil observasi dapat di cek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸⁶

⁸⁵ Ibid, hlm. 178

⁸⁶ Ibid, hlm. 178

2. Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi sangat membantu memudahkan peneliti dalam pengecekan keabsahan data, karena dari referensi yang ada sebagai pendukung dari observasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Menurut Eister (1975) kecukupan referensi sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.⁸⁷

3. Teknik *member check*

Menurut Lincoln (1993) teknik *member check* yaitu dengan mendatangi kembali informan sambil memperlihatkan data yang sudah diketik pada lembar catatan lapangan yang sudah disusun menjadi paparan data dan temuan penelitian. Serta dikonfirmasi pada informan apakah maksud informan itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis atau belum. Intinya dalam *member check* informan dan peneliti mengadakan *review* terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian baik isi maupun bahasanya.⁸⁸

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ada tiga, yaitu: tahap sebelum ke lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data Berikut uraian secara rinci dan berurutan:

1. Tahap Pra Lapangan

Adapun dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lain:

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 181

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 221

- a. Memilih lapangan penelitian. Dengan pertimbangan bahwa di SMP Negeri 13 Komite sekolahnya sudah terbentuk yakni seiring dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Selain itu, di lokasi ini memungkinkan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan observasi karena letaknya yang strategis dan merupakan salah satu sekolah unggulan di kota Malang.
- b. Mengurus perijinan penelitian secara formal.
- c. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan SMP Negeri 13 Malang selaku objek penelitian. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, keadaan alam dan sebagainya. Selain itu, penjajakan ini juga untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lain:

- a. Mengadakan observasi langsung ke SMP Negeri 13 Malang dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data.
- b. Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena, proses pembelajaran dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian yang peneliti lakukan (Peran

Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang).

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 13 Malang

Berdasarkan data dokumen yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa pada mulanya SMP Negeri 13 Malang merupakan sekolah filial SMPN 1 Malang pada tahun 1983 dengan tujuan sebagai sekolah yang menampung sebagian siswa SMPN 1 Malang yang melebihi target jumlah kelas yang disediakan. Seluruh guru dan staf akademika SMP Negeri 13 Malang mulanya juga berasal dari SMPN 1 Malang, sedangkan yang menjabat sebagai kepala sekolah pada waktu itu adalah Ibu Dra. Toeti Antasy. Sekolah filial ini bertempat di SDN 7 Dinoyo Malang dengan jumlah kelas sebanyak 2 ruang untuk kelas 1. Atas usulan dari beberapa guru, akhir tahun 1984 SMP Negeri 13 Malang pindah dan menempati SMPS di jalan Veteran yang sekarang ditempati SMKN 2 Malang.

Sehubungan dengan perkembangan jumlah siswa yang semakin pesat dan atas prakarsa dari berbagai pihak, pada tahun 1985, SMP Negeri 13 Malang mulai mendapat bantuan pembangunan gedung sekolah di jalan Sunan Ampel II Kota Malang. Akhirnya pada tahun 1985 SMP Negeri 13 filial SMPN 1 Malang diresmikan menjadi SMP Negeri 13 Malang, dengan jumlah murid sebanyak 120, jumlah kelas sebanyak 6 kelas dan tenaga pengajar

sebanyak 10 orang. Sejak dibangunnya gedung sekolah yang baru, SMP Negeri 13 mengalami kemajuan jumlah siswa yang sangat pesat.

Sejak berdiri sampai saat ini, SMP Negeri 13 Malang telah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah. Secara berurutan pergantian kepala SMP Negeri 13 Malang adalah sebagai berikut:

- a. Dra. Toeti Antasy (Tahun 1983-1988)
- b. Sedijono (Tahun 1988-1991)
- c. Wulan Tjahjani (Tahun 1991-1995)
- d. Dra. Hj. Roesmani (Tahun 1995-1998)
- e. Drs. Yuwono Patwiyanto, M.Pd (Tahun 1998-2002)
- f. Dra. Asmiaty (Tahun 2002-2005)
- g. Drs. H. Muhammad Nurfakih, M.Ag (Tahun 2005-Sekarang)

2. Letak Geografis

SMP Negeri 13 Malang bertempat di Jl Sunan Ampel II Dinoyo Malang (150m lokasi UIN Malang).

3. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran sekolah yang digunakan dimasa depan secara utuh, sedangkan misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi, antara visi dan misi merupakan dua hal yang saling berkaitan, adapun visi dan misi SMP Negeri 13 Malang yaitu:

a. Visi Sekolah

“UNGGUL DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BERDASARKAN BUDAYA BANGSA”

b. Misi Sekolah

1. Menumbuhkan penghayatan pengamalan terhadap ajaran agama dan budi pekerti.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif agar mencapai prestasi yang optimal.
3. Menerapkan disiplin kedalam kegiatan sehari-hari sehingga tercipta suasana kondusif.
4. Menyediakan wadah penyaluran bakat dan minat siswa dalam bidang seni dan olah raga.
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstra kurikuler.

c. Strategi Sekolah

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianut.
2. Menumbuhkan penghayatan dan menunjang tinggi budaya bangsa
3. Bersikap santun terhadap orang yang lebih tua
4. Melaksanakan bimbingan belajar intensif agar unggul dalam memperoleh NUN.
5. Menumbuhkan semangat keunggulan terhadap warga sekolah.
6. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi (dirinya) sehingga dapat berkembang secara optimal.

7. Mengadakan kegiatan dan melatih kegiatan ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja.
8. Menambah jumlah jam pada pelajaran tertentu.
9. Tata tertib dalam memenuhi kewajiban dan menerima haknya.
10. Bersedia menerima sanksi jika melanggar tata tertib, dan berhak mendapat pujian (penghargaan) jika berprestasi.
11. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
12. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler PMR.
13. Pembinaan dan pelatihan bina vokalia.
14. Pembinaan dan pelatihan drum band/marching band.
15. Pembinaan dan pelatihan seni tari.
16. Pembinaan dan pelatihan bola voli.
17. Pembinaan dan pelatihan seni modeling.
18. Pembinaan dan pelatihan bola basket.
19. Pembinaan dan pelatihan bela diri
20. Pembinaan dan pelatihan bela diri dan tapak suci.
21. Pembinaan dan pelatihan sepak bola.
22. Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah.
23. Menumbuhkan rasa kekeluargaan warga sekolah.
24. Menerapkan manajemen partisipasi semua komponen dengan melibatkan warga sekolah dan *stakeholder*, dan dengan memberdayakan masyarakat untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah.

d. Tujuan

1. Unggul dalam beragama dan budi pekerti,
2. Unggul dalam berprestasi,
3. Unggul dalam disiplin,
4. Unggul dalam kesenian,
5. Unggul dalam seni olah ragaan, dan
6. Unggul dalam kepedulian terhadap lingkungan.

4. Struktur Organisasi SMP Negeri 13 Malang

SMP Negeri 13 Malang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu empat orang wakil kepala sekolah yang membidangi empat urusan yang memerlukan penanganan secara terarah dan terpadu di sekolah.

Kepala sekolah dijabat oleh Drs. Muhammad Nurfakih, M.Ag. selanjutnya empat orang wakil kepala sekolah yang membidangi empat urusan, masing-masing wakil kepala bagian kurikulum dijabat oleh Hr. Supriyanto, S.Pd. wakil kepala bagian sarana prasarana dijabat oleh H. Nursalim, S.Pd. wakil kepala bagian humas dijabat oleh Dra. Sriyatun, S.Pd. wakil kepala bagian kesiswaan dijabat oleh Siti Rochani.

a. Kepala sekolah

Adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengembangkan dan memajukan SMP Negeri 13 Malang, antara lain:

1. Kepala sekolah sebagai edukator
2. Kepala sekolah sebagai manajer

3. Kepala sekolah sebagai administrator

4. Kepala sekolah sebagai supervisor

b. Kurikulum

Wakil kepala sekolah urusan kurikulum dijabat oleh Hr. Supriyanto, S.Pd yang bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala sekolah yaitu: 1) menyusun program pengajaran, 2) menyusun pembagian tugas guru, 3) menyusun jadwal pelajaran, 4) menyusun jadwal evaluasi pelajaran, 5) menyusun pelaksanaan ujian sekolah/ujian nasional, 6) menerapkan kriteria persyaratan naik kelas/ tidak naik kelas, 7) menerapkan jadwal penerimaan buku raport, SKHU dan STTB, 8) mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran, 9) menyediakan buku kemajuan kelas.

c. Sarana dan Prasarana

Wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana dijabat oleh H. Nursalim S.Pd yang bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala sekolah yaitu: 1) menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, 2) mengadministrasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, 3) pengolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.

d. Kesiswaan

Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dijabat oleh Siti Rochani yang bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala sekolah yaitu 1) menyusun program pembinaan kesiswaan/OSIS, 2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan OSIS untuk menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, 3) membina dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan 7K,

4) memberikan pengarahan dalam pemilihan pengurus OSIS, 5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan siswa secara berkala, 6) mengatur mutasi siswa. Adapun data struktur organisasi SMP Negeri 13 Malang dapat dilihat dihalaman Impiran.

5. Sejarah berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang

Berdirinya komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yaitu perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya komite sekolah tidak jauh berbeda dengan BP3 yang ada di setiap satuan pendidikan. Hal yang membedakannya adalah komite sekolah merupakan perluasan peran dan fungsi BP3.

Dengan adanya Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional di atas serta anjuran dari pemerintah, pihak SMP Negeri 13 Malang langsung merespon perihal tersebut dengan baik, terbukti dari hasil

wawancara penulis dengan Bapak H. Shaleh Suaidi, S.H selaku ketua komite sekolah sebagai berikut:

“Di SMP Negeri 13 ini telah dibentuk komite sekolah, yang mana komite sekolah ini dibentuk atas dasar Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, yang dikeluarkan tanggal 2 April 2002. Sebelum dibentuk komite sekolah ini, dulunya adalah BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Adapun tujuan terbentuknya komite sekolah adalah untuk membantu pelaksanaan kegiatan sekolah, yakni menjembatani antara sekolah dengan wali murid.⁸⁹

Sebagaimana pernyataan di atas, SMP Negeri 13 Malang telah melaksanakan amanat pemerintah tersebut dengan respon yang baik, karena pada dasarnya hal ini berangkat dari asumsi bahwa sekolah memiliki ikatan yang sangat erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah dalam menjalankan amanat tersebut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, maka pihak SMP Negeri 13 Malang memberdayakan komite sekolah yang berada dalam lembaganya.

6. Struktur Organisasi komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang

Dalam instansi lembaga perlu adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka semua anggota mengetahui kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu pula komite sekolah harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Oleh karena itu, di SMP Negeri 13 Malang juga sudah disusun struktur organisasi komite SMP Negeri 13 Malang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris,

⁸⁹ Wawancara dengan H. Shaleh Suaidi, selaku Ketua Komite SMP Negeri 13 Malang, tanggal 16 Oktober 2009

bendahara, dan seksi-seksi atau anggota. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat struktur organisasi komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang pada halaman lampiran.

7. Keadaan Guru di SMP Negeri 13 Malang

Guru merupakan faktor terpenting dalam pendidikan, karena sebagai seorang guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar saja, melainkan juga sebagai pembimbing, pendorong/motivator, serta suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Untuk itu guru perlu memiliki keahlian dan ketrampilan yang diperlukan oleh peserta didik pada saat terjun ke masyarakat.

Guru atau tenaga pengajar SMP Negeri 13 Malang sebanyak 73 orang. Sebagian dari mereka ada yang berstatus sebagai Guru Tetap (GT) dan sebagian yang lain berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). Di samping tenaga pengajar, untuk memperlancar kegiatan pendidikan di SMP Negeri 13 Malang juga ada staf TU, pegawai perpustakaan, dan bagian gudang. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan guru dan staf lainnya yang membantu jalannya proses pendidikan di SMP Negeri 13 Malang dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis peroleh di halaman lampiran.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan guru di SMP Negeri 13 Malang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan guru yang rata-rata telah menempuh jenjang pendidikan S1 bahkan ada juga guru yang telah menempuh jenjang S2 serta kesesuaian dengan bidang studi yang diajarkan. Sedangkan keadaan karyawan di SMP Negeri 13 Malang cukup

memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi guna menjalankan kelancaran proses belajar-mengajar.

Dengan adanya guru yang memiliki tingkat akademik yang tinggi dan berkualitas diharapkan para guru mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru juga dapat mendidik dan membimbing para siswa SMP Negeri 13 Malang menjadi siswa yang berkualitas dan siap bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain.

8. Keadaan Siswa-siswi di SMP Negeri 13 Malang

Siswa atau peserta didik merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi mengajar. Siswa tidak hanya dikatakan sebagai obyek tetapi juga dikatakan sebagai subyek didik. Dengan demikian maka akan mengalami dinamika sebagai proses belajar-mengajar. Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa data siswa-siwi SMP Negeri 13 tahun ajaran 2009/2010 dapat dilihat di halaman lampiran.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa-siswi SMP Negeri 13 untuk tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 916 yang terdiri dari 305 siswa kelas VII, 297 siswa kelas VIII, dan 314 siswa kelas IX.

9. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana

merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasana yang dimiliki SMP Negeri 13 Malang dapat dilihat di halaman lampiran.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 13 Malang dalam kondisi baik. Hal tersebut sangat membantu kelancaran kegiatan belajar-mengajar, karena sarana dan prasarana yang diinginkan oleh semua pihak sekolah dapat terpenuhi.

Pihak SMPN 13 Malang juga selalu berusaha memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran karena diharapkan terpenuhinya fasilitas pendidikan merupakan penunjang terhadap keberhasilan peningkatan mutu sekolah yang telah ditetapkan, yang hal ini lebih spesifik pada peningkatan prestasi siswa.

B. Paparan Data

1. Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencerminan nilai-nilai keagamaan dalam kesehariannya.

Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Mufidah, selaku guru pendidikan agama Islam sebagai berikut:

“Mutu pendidikan agama Islam disini sudah cukup baik, semua kegiatan keagamaan atau yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam berjalan cukup baik dan sesuai prosedur yang direncanakan. Misalnya adanya shalat dhuhur berjama’ah dan pelaksanaan shalat jum’at bagi peserta didik laki-laki di mushalla sekolah. Selain itu, setiap hari sebelum jam pelajaran pertama dimulai, selalu dilakukan kegiatan imtaq yaitu membaca surat-surat pendek dan doa-doa selama kurang lebih 15 menit.”⁹⁰

Hal senada juga dikatakan oleh oleh Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru pendidikan agama Islam sebagai berikut:

“Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang ini saya anggap cukup baik, karena saya melihat dari keseharian anak didik baik dalam hal kegiatan agamanya, kejujurannya, tata krama dan kedisiplinan anak waktu masuk kelas. Selain itu, saya juga melihat dari kemampuan anak didik dalam membaca al-qur’an, mereka rata-rata sudah bisa membaca al-qur’an dengan lancar walaupun ada juga diantara mereka yang kurang lancar membacanya.”⁹¹

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Di SMP Negeri 13 Malang ini mutu pendidikan agama Islamnya maju, hal ini dapat dilihat dari segi kognitif, afektif, psikomotoriknya. Psikomorik misalnya shalatnya, disini diwajibkan shalat dzuhur berjama’ah dan bagi anak laki-laki setiap hari jum’at wajib berjum’atan di mushalla yang ada di sekolah, dan anak-anak disini aktif melakukannya. Afektif misalnya sikapnya guru, sikap belajar dan sikap menanggapi hari-hari besar Islam. Kognitif dinilai dari nilai-nilai yang diuji misalnya, nilai untuk shalat, baca tulis alqur’an dan ulangan yang berhubungan dengan materi-materi pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa

⁹⁰ Wawancara dengan Mufidah, selaku Guru PAI SMP Negeri 13 Malang, tanggal 10 Oktober 2009.

⁹¹ Wawancara dengan Siti Fatimah, selaku Guru PAI SMP Negeri 13 Malang, tanggal 10 Oktober 2009.

memperoleh nilai diatas standar kelulusan minimal, walaupun masih ada sebagian siswa yang memperoleh nilai dibawah rata-rata.⁹²

Sehubungan dengan hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sriyatun, S. Pd, selaku bagian humas dan sekretaris komite sekolah sebagai berikut:

“Mutu pendidikan agama Islam di sekolah ini saya katakan baik, kegiatannya termasuk ada nilai lebihnya daripada sekolah-sekolah lain yang saya kenal, misalnya untuk hari jum’at anak-anak sudah memakai seragam muslim, jadi anak-anak yang muslim maupun non muslim semua memakai pakaian panjang, Sehingga di hadapan pada waktu jum’atan tidak ada alasan untuk tidak membawa sarung sehingga bisa diwajibkan jum’atan di sekolah, sekalian ada unsur syiar semua pakai busana muslim dalam kaitannya mengembangkan dakwah Islamnya kan ada. Untuk kelas VIII ada kegiatan imtaq beserta ada logonya juga, sedangkan untuk kelas VII, VIII, dan IX ada kegiatan jum’at wajib. Di SMP Negeri 13 Malang ini siswanya selain beragama Islam, ada pula yang beragama Hindu, Kristen, Katolik dan Nasroni karena di sini sekolah umum jadi tidak membatasi masalah agama, cuma pencerminan dari Negara kita kan mayoritas Islam, yang ada agama lain dikelompokkan dalam satu kelas, dengan harapan pada waktu kegiatan agama Islam tidak banyak yang keliaran. Jadi biasanya kalau agama Islam ada kegiatan pembinaan, agama Nasranipun ada kegiatan pembinaan, akan tetapi untuk agama Hindu tidak ada kegiatan tersendiri tapi biasanya menggabung dengan sekolah yang lain”.⁹³

Hal serupa diungkapkan pula oleh Bapak H. Shaleh Suaidi, S.H selaku ketua komite sekolah sebagai berikut:

“Saya kira cukup bagus, untuk jama’ah shalat dhuhur, jum’atan, dan peringatan hari-hari besar Islam semuanya jalan di SMP Negeri 13 Malang, walaupun guru pendidikan agamanya wanita cuma 2 orang tapi guru yang lain pun juga ikut mendukung dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.”⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, selaku Kepala SMP Negeri 13 Malang, tanggal 15 Oktober 2009.

⁹³ Wawancara dengan Sriyatun, selaku Sekretaris Komite SMP Negeri 13 Malang, tanggal 4 Oktober 2009

⁹⁴ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op. cit.*

Dengan adanya guru agama yang memiliki berbagai macam kreativitas atau dapat mengembangkan kreativitasnya dengan baik merupakan salah satu penyebab pendidikan agama Islam dikatakan memiliki mutu yang cukup baik, karena dengan adanya guru agama yang kreatif tersebut maka proses belajar-mengajar akan lebih menyenangkan, siswa tidak merasa bosan karena gurunya pandai membaca situasi dan kondisi serta mampu menerapkan pendekatan-pendekatan metode serta mampu memanfaatkan media belajar secara maksimal. Pada akhirnya peserta didik akan puas dengan hasil belajar yang telah diperoleh karena peserta didik telah bisa mengeluarkan sebuah kemampuannya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru bidang studi PAI di SMPN 13 Malang:

”Dalam menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam, saya menggunakan beberapa metode. Metode yang biasa digunakan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, pengelompokan. Pengelompokan disini bisa berupa metode debat, metode Jigsaw dan lain-lain. Penggunaan metode tersebut disesuaikan dengan materi pelajaran, dengan adanya beberapa metode yang diterapkan dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam menjadikan peserta didik lebih mudah memahami materi dan tidak membuat peserta didik mudah jenuh”.⁹⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Mufidah, selaku guru pendidikan agama Islam sebagai berikut:

“Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam bermacam-macam ada tanya jawab, ceramah dan lain-lain sesuai materi yang diajarkan. Saya juga biasanya menggunakan metode driil atau praktek, materi yang saya praktekan biasanya berhubungan dengan shalat dan wudhu. Jadi anak-anak langsung saya ajak ke mushalla, tahap pertama anak-anak saya perintahkan untuk melakukan wudhu secara bergantian, selanjutnya saya amati anak-anak yang melakukan praktek tersebut, setelah semua

⁹⁵ Wawancara dengan Siti Fatimah, *op. cit.*

siswa melakukan praktek baru saya jelaskan dimana letak kesalahan mereka setelah itu saya jelaskan bagaimana cara wudhu yang benar. Begitu juga praktek shalat setelah semua siswa selesai melakukan praktek shalat baru saya jelaskan di mana letak kesalahan mereka dan saya tunjukkan bagaimana tata cara shalat yang benar.⁹⁶

Dengan adanya guru yang memiliki berbagai macam kreativitas dalam proses belajar mengajar, disamping mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru agama juga membuat peserta didik yang ada di SMP Negeri 13 Malang lebih banyak mengerti tentang keagamaan, hal ini bisa dilihat dari kebiasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran mereka sangat memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh Bapak/Ibu guru, mereka tidak ramai sendiri ketika mengikuti proses pembelajaran. Begitu juga nilai pendidikan agama Islam yang mereka dapatkan sudah memenuhi standar kelulusan yang cukup tinggi. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru bidang studi PAI di SMPN 13 Malang:

”Pada waktu proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas anak-anak cukup antusias memperhatikan apa yang saya sampaikan, apalagi kalau materinya memakai praktek (misalnya: materi tentang shalat dan wudhu), anak-anak bertambah semangat mengikutinya walaupun awalnya mereka masih banyak yang salah tapi saya senang melihat anak-anak memiliki semangat yang tinggi.⁹⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Mufidah, selaku guru pendidikan agama Islam sebagai berikut:

“Ketika proses belajar mengajar dikelas anak-anak sangat memperhatikan apa yang saya sampaikan dan mereka juga tidak ramai sendiri ketika mengikuti proses pembelajaran. Dan nilai yang biasanya saya pakai dalam menentukan siswa itu layak memiliki nilai bagus dan jelek dalam bidang keagamaan adalah keseharian dari peserta didik itu

⁹⁶ Wawancara dengan Mufidah, *op. cit.*

⁹⁷ Wawancara dengan Siti Fatimah, *op. cit.*

sendiri baik dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas atau dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Kalau peserta didik itu dalam kesehariannya rajin mengikuti kegiatan keagamaan, misalnya rajin shalat jamaah dhuhur, jum'atan bagi yang laki-laki dll, maka saya akan memberi nilai tambah buat anak itu.⁹⁸

Selain dengan adanya guru agama yang memiliki berbagai macam kreativitas, adanya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan penyebab pendidikan agama Islam dikatakan memiliki kualitas yang cukup baik, karena apabila dalam sekolah tersebut kurang adanya sarana dan prasarana maka akan dapat menghambat jalannya proses belajar mengajar. Misalnya tidak ada tempat ibadah (mushola), tempat wudlu, alat peraga, dan tidak ada lingkungan yang mendukung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka akan menghambat guru agama dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Mufidah, selaku guru pendidikan agama Islam sebagai berikut:

“Adapun sarana dan prasarana yang di miliki SMP Negeri 13 Malang ini, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, adalah: musholla bisa dilihat sendiri musholahnya cukup memadai, kalau untuk kelas VII, VIII dan IX jum'atan cukup, kemudian disini juga ada kegiatan penayangan memakai media ada di ruang Audio, biasanya kalau ada kegiatan belajar-mengajar di kelas, suatu saat saya mengajak anak-anak melihat tayangan dengan memakai TV dan CD. Kemudian ada juga tempat wudhu dll. Disini ada pula kegiatan kesenian yang terkait dengan pendidikan agama Islam misalnya terbangan, hadrah, sholawatan, dan mauludan.”⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Mufidah, *op. cit.*

⁹⁹ Wawancara dengan Mufidah, *op. cit.*

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru bidang studi PAI di SMPN 13 Malang:

”Di sekolah ini sarana dan prasarana yang dimiliki dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam cukup memadai yaitu: adanya mushalla yang cukup luas, tempat wudhu, ada buku-buku agama dan LKS, TV, VCD, dan lingkungan sekolah yang asri dan nyaman.”¹⁰⁰

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

”Untuk sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan agama Islam, disini ada musholla yang cukup luas, tempat wudhu, karpet, mukenah, sarung, buku-buku perpustakaan Islam, ini rencana mau dibuatkan laboratorium pendidikan agama Islam yang mana didalamnya akan diisi kaset-kaset yang berhubungan dengan agama, TV, buku-buku agama dll”.¹⁰¹

Sehubungan dengan hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Miftahul Mu’aziyah, S.Pd, selaku bendahara komite sekolah sebagai berikut:

”Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu: ada mushalla, disana anak-anak disediakan mukenah, sarung, kemudian kadang-kadang untuk menghindari kebosanan di kelas anak-anak juga belajarnya dimushalla, disediakan bangku kecil-kecil jadi suasananya lebih mendukung.”¹⁰²

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Siti Fatimah, *op. cit.*

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *op. cit.*

¹⁰² Wawancara dengan Miftahul Mu’aziah, selaku Bendahara Komite Sekolah di SMP Negeri 13 Malang, tanggal 7 Oktober 2009

dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Di SMP Negeri 13 Malang dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai, telah dapat menghasilkan lulusan (*output*) yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar lulusan sekolah ini diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan, rajin melaksanakan shalat dan bisa membaca al-qur’an.”¹⁰³

Dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam akan berpengaruh kepada seluruh aspek peserta didik yang mana akan membentuk kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT. Dengan adanya hal tersebut maka ada upaya-upaya yang seharusnya dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga pendidikan agama Islam yang ada di lembaga tersebut dapat bermutu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Ada beberapa upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP 13 ini, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan keagamaan, agar siswa nyaman dalam melaksanakan kegiatan PAI misalnya: pelebaran mushalla, pengadaan mukenah, pengadaan sarung, tempat wudhu, karpet, dan rencananya mau dibangun laboratorium PAI yang di dalamnya terdapat buku-buku keagamaan, kaset-kaset yang berhubungan dengan agama, TV di;
- b. Mengadakan ekstrakurikuler keagamaan wajib, misalnya: imtaq setiap hari sabtu;
- c. Mewajibkan melaksanakan shalat dhuhur berjama’ah;
- d. Mewajibkan shalat jum’at berjama’ah bagi anak laki-laki;
- e. Selalu mengadakan PHBI.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *op. cit.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *ibid.*

Dengan diadakannya beberapa kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 13 Malang cukup memberikan banyak manfaat atau hasil bagi peserta didik itu sendiri, diantara hasil yang diperoleh oleh peserta didik dari terlaksananya beberapa kegiatan keagamaan yaitu: misalnya; dengan diadakannya wajib jama'ah dhuhur dan jum'at di mushalla yang ada di sekolah, maka peserta didik yang ada di SMP Negeri 13 sedikit demi sedikit dalam diri mereka telah tertanam pembiasaan shalat dengan berjama'ah, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan jama'ah dhuhur dan jum'at, walaupun tanpa adanya perintah terlebih dahulu dari guru agama peserta didik sudah berantusias mengikuti jama'ah dhuhur dan jum'at tersebut. Selain itu, peserta didik di SMP Negeri 13 Malang juga menorehkan beberapa prestasi dalam bidang pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu: memperoleh juara kaligrafi arab, pidato bahasa arab, dan puisi rohani sekota Malang, meskipun tidak mendapatkan juara pertama setidaknya SMP Negeri 13 Malang dapat mengukir prestasi yang gemilang, karena dilihat dari latar belakangnya yang merupakan sekolah umum yang hanya sedikit mendapat masukan tentang keagamaan tetapi tidak kalah dengan sekolah lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru bidang studi PAI di SMPN 13 Malang:

”Ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik SMP Negeri13 Malang dalam bidang pendidikan agama Islam, misalnya: memperoleh juara kaligrafi arab, pidato bahasa arab, dan puisi rohani sekota Malang.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Siti Fatimah, *op. cit.*

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa SMP Negeri 13 Malang mempunyai mutu pendidikan agama Islam yang cukup baik. Meskipun pada dasarnya SMP Negeri 13 Malang merupakan sekolah umum yakni sekolah yang tidak hanya menampung siswa yang beragama Islam saja, tetapi budaya keislamannya sangat kental.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa baiknya mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dapat dilihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan tadarrus surat-surat pendek dengan baik dan benar yang dilakukan 15 menit sebelum jam pertama dimulai, siswa sangat memperhatikan dan tidak ramai sendiri ketika mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam, aktif mengikuti *ekstrakurikuler* keagamaan, selalu rajin melakukan shalat dhuhur dan shalat jum'at secara berjama'ah, dan ketika istirahat, tidak sedikit siswa yang melakukan shalat sunnah dhuha dan membaca al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya, SMP Negeri 13 Malang selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam.

Sedangkan dari data dokumentasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dari nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dalam bidang studi pendidikan agama Islam kelas VII sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas Standar Ketuntasan Minimal (SKM), hanya ada sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Dan di SMP Negeri 13 Malang ini juga mempunyai SKM yang tinggi termasuk SKM bidang studi pendidikan agama Islam yakni 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan agama

Islam yang ada di SMP Negeri 13 Malang ini memang cukup baik. Data dokumentasi tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

SMP Negeri 13 Malang juga menorehkan prestasi dalam bidang pendidikan agama Islam, di antaranya yaitu SMP Negeri 13 Malang sering memperoleh juara lomba-lomba keagamaan seperti kaligrafi arab, pidato bahasa arab, dan puisi rohani sekota Malang, meskipun tidak mendapatkan juara pertama setidaknya SMP Negeri 13 Malang dapat mengukir prestasi yang gemilang, karena dilihat dari latar belakangnya yang merupakan sekolah umum yang hanya sedikit mendapat masukan tentang keagamaan tetapi tidak kalah dengan sekolah lainnya.

Kita banyak melihat di sekolah-sekolah umum yang tidak begitu memperhatikan pendidikan agama Islam, tapi di SMP Negeri 13 Malang pendidikan agama Islam cukup mendapatkan perhatian baik dari guru-gurunya maupun para siswa, dan beberapa hal di atas lah yang dapat menyebabkan pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dikatakan cukup bermutu.

2. Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang

Pada umumnya, setiap lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri-dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen-sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang

diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada *customers* (pelanggan).

Secara sederhana pelanggan (*customers*) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. *Internal customer* adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai *manager* sekaligus *leader*, guru dan karyawan. Sedangkan *external customer* adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri.

Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua *customer* tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. *Internal customer* berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan *external customer* adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari *Internal customer*.

Untuk inilah, maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik *Internal customer* maupun *external customer*.

Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi *transparan*, *akuntabel*, dan *demokratis* dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara *akuntabel* bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Shaleh Suaidi, S.H selaku ketua komite sekolah, beliau menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembentukan komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang ini terlebih dahulu kita mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, alumni, wali murid-wali murid yang

dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan.”¹⁰⁶

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sriyatun, S. Pd selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang, sebagai berikut:

“Mekanisme pemilihan/pembentukan anggota dan pengurus komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang ini dilakukan secara musyawarah, untuk pemilihannya biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Pada waktu pemilihan, sekolah mengundang wali murid yang puteranya masih dikelas VII jadi baru masuk. Dan ada juga sebgayaan wali murid yang lama supaya tidak terputus hubungannya. Disana ada aturannya dari wali murid murni dan ada wali murid yang sekaligus menjabat sebagai guru disini, alumni dan *steakholder*. Jadi orang-orang yang berperan di sekitar kita yang mendukung, kita undang beberapa orang itu kemudian dari orang-orang yang hadir itu kita mengadakan musyawarah, kemudian kita pemilihan. Sebelumnya kita undang beberapa orang calon, dari yang datang kita musyawarakan apa yang diinginkan secara pemilihannya setelah itu kita adakan pemilihannya, dan ada pernyataan kesanggupan.”¹⁰⁷

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Ibu Miftahul Mu’aziah, S.Pd, selaku bendahara komite sekolah, sebagai berikut:

“Adapun mekanisme pembentukan komite sekolah di sekolah ini, pertama-tama kita memilih wali siswa yang diharapkan peduli dengan kondisi sekolah. Jadi wali siswa yang setidaknya dia itu mengetahui, bukan wali siswa yang awam sekali. Dan diharapkan sesekali punya waktu untuk datang ke sekolah. Kemudian mereka diundang dan pada saat itu diadakan pemilihan komite sekolah secara foting.”¹⁰⁸

Sebagaimana pernyataan diatas, SMP Negeri 13 Malang telah melaksanakan pembentukan/pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah yang mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis, seperti yang tertulis dalam SK. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam tentang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op. cit.*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Sriyatun., *op. cit.*

¹⁰⁸ Wawancara dengan Miftahul Mu’aziah, *op. cit.*

prinsip pembentukan komite sekolah, yaitu: *transparansi, akuntabilitas*, dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan.

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik. Adapun peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu:

a. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory Agency*)

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Hal ini Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang beliau menyatakan bahwa:

“Komite sekolah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam, misalnya dalam hal pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI, sebelum sekolah mengambil keputusan, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite sekolah kepada pihak sekolah.”¹⁰⁹

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sriyatun, S. Pd selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang, sebagai berikut:

“Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan pelebaran mushalla, rencana pembangunan laboratorium PAI dll, maka pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah.”¹¹⁰

Selain daripada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS),

¹⁰⁹ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *op. cit.*

¹¹⁰ Wawancara dengan Sriyatun, *op. cit.*

kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.

Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan ketua komite SMP Negeri 13 Malang yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang bahwa keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. berikut hasil wawancaranya:

“Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS”. Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain: SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.”¹¹¹

Hal senada diungkapkan pula Ibu Siti Fatimah S.PdI selaku guru bidang studi PAI di SMPN 13 Malang sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian, komite SMP Negeri 13 Malang sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk pembelajarannya.”¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op. cit.*

¹¹² Wawancara dengan Siti Fatimah, *op. cit.*

b. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite sekolah diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak akan dapat berperan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas (*stakeholders*).

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, ruang belajar yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di

sekolah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan menjadi orang tua asuh.

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Anggaran itu diperoleh dari upaya anggota komite sekolah sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti alumni sekolah. Orang tua siswa yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan di sekolah dapat memberikan bantuan keuangan atau barang-barang, baik secara perorangan maupun lembaga.

Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik sekali mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan.”¹¹³

¹¹³ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *op. cit.*

Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sriyatun, S. Pd selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang, beliau menyatakan bahwa:

“Komite sekolah peranannya sangat mendukung khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, misalnya setiap hari besar Islam komite sekolah selalu ikut andil dalam acara tersebut, dengan mengadakan lomba-lomba Islami, misalnya pidato, puisi kaligrafi, peragaan busana muslim, tartil dan qiro’ah, adzan, dll. Tidak hanya itu, komite sekolah juga membantu pengadaan alat-alat shalat seperti: mukenah dan sarung yang ada di mushalla, kan pada hari-hari biasa siswa-siswi banyak yang tidak membawa mukenah dan sarung tapi sekarang di mushalla sudah ada dan itu hasil dari kerjasama dengan komite sekolah melalui iuran rutin.¹¹⁴

Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Miftahul Mu’aziah, S.Pd selaku bendahara komite sekolah, mengatakan bahwa:

“Dalam hal sarana dan prasarana komite sekolah ikut memberi dukungan dan bantuan dalam pelebaran mushalla, pengadaan alat shalatnya, membantu kelancaran air wudhu ketika sumurnya mati, memperluas tempat wudhu, dll.¹¹⁵

Komite sekolah juga tidak hanya memberikan dukungan dalam pengadaan sarana dan prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Shaleh Suaidi, sebagai berikut

“Selain membantu dalam masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru khususnya guru pendidikan agama Islam senantiasa

¹¹⁴ Wawancara dengan Sriyatun, *op. cit.*

¹¹⁵ Wawancara dengan Miftahul Mu’aziah, *op. cit.*

dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju lagi dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.”¹¹⁶

c. Sebagai Pengontrol

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Nurfakih, M.Ag, selaku kepala SMP Negeri 13 Malang, beliau mengatakan bahwa:

“Peran komite sekolah di SMP Negeri 13 ini dalam hal *controlling agency* yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar-mengajar.”¹¹⁷

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak H. Shaleh Suaidi, S.H selaku ketua komite sekolah, sebagai berikut:

“Kalau masalah kontrol, saya setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga mengontrol jalannya proses belajar-mengajar peserta didik SMP Negeri 13 Malang”¹¹⁸

¹¹⁶ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op .cit.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Nurfakih, *op. cit.*

¹¹⁸ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op .cit.*

Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Miftahul Mu'aziah, S.Pd, selaku bendahara komite sekolah yang mengungkapkan bahwa peran *controlling agency* yang diemban oleh komite sekolah tidak hanya terbatas pada finansial saja, melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas. Berikut hasil wawancaranya.

“Sebagai badan pengontrol, komite sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: penambahan buku-buku agama, dan kaset-kaset yang berhubungan dengan agama yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.”¹¹⁹

Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Sriyatun, S. Pd selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Dalam hal pengawasan atau kontrol, komite sekolah biasanya melakukan pengawasan langsung ke pelaksanaan pendidikan, misalnya: mengamati dari siswanya dan laporan hasil belajarnya. Di samping itu, komite sekolah juga mengontrol program penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti pengembangan silabus, bahan ajar dll”¹²⁰

Peran *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan masyarakat memberikan *service* yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan *input* dan *output* yang dihasilkan sekolah. Karena sistem sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka antara *input* dan *output* pun yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

¹¹⁹ Wawancara dengan Miftahul Mu'aziah, *op. cit.*

¹²⁰ Wawancara dengan Sriyatun, *op. cit.*

d. Sebagai Mediator

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat *akuntabel* (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam operasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat,

sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak H. Shaleh Suaidi, S.H selaku ketua komite sekolah yang menjelaskan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Berikut ini hasil wawancaranya:

“Selain dalam hal pengembangan fisik, komite sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat mengasramahkan peserta didik yang nakal-nakal pada waktu liburan, agar anak-anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dan berakhlak, ini tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tua.”¹²¹

Komite sekolah juga berperan menyerap dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebagai mediator ini memberikan *support* bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite sekolah siap menampung segala keluh kesah yang dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pimpinan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sriyatun, S. Pd selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang sebagai berikut:

“Keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 13 ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan, selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat *support* dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.”¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Shaleh Suaidi, *op .cit.*

¹²² Wawancara dengan Sriyatun, *op. cit.*

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarah dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah peneliti temukan dengan beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru.

A. Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 13 Malang

Di negara Indonesia saat ini, masalah peningkatan mutu pendidikan Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik. Masalah yang ada, 1) pendidikan Islam yang kuantitasnya begitu besar dan tersebar di seluruh penjuru negeri telah begitu kuat mengakar di dalam hati masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim, serta 2) telah terjadi kemerosotan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. dan pembelajaran yang fokus orientasinya bersifat *subject matter oriented* dalam arti memahami dan menghafal pelajaran sesuai dengan kurikulum saja.

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan

yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.¹²³

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru-termasuk guru BP-, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya).¹²⁴

Dari segi *input* SMP Negeri 13 Malang dapat dikatakan cukup bermutu, hal ini dilihat dari peserta didiknya yang mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, di SMP Negeri 13 Malang juga mempunyai guru yang jumlahnya cukup banyak dan rata-rata telah menempuh jenjang pendidikan SI bahkan ada juga yang menempuh jenjang S2, staf TU, konselor dan administrator yang mempunyai keahlian dibidangnya dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu: adanya ruang kelas, mushalla yang cukup luas, tempat wudhu, karpet, peralatan shalat (misalnya: mukenah dan sarung), ruang audio yang di dalamnya ada TV, VCD dan kaset-kaset yang berhubungan dengan agama, buku-buku agama, LKS, perpustakaan, dan lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat mempermudah guru dan siswa untuk

¹²³ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 25.

¹²⁴ Rohiat, *op. cit.*, hlm. 52

melaksanakan proses belajar mengajar. Dan di sekolah ini juga akan di bangun laboratorium khusus PAI.

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan *input* sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.¹²⁵

Dalam proses belajar-mengajar, guru agama di SMP Negeri 13 telah menggunakan metode belajar yang bervariasi sehingga membuat peserta didik lebih mudah memahami materi PAI yang disampaikan oleh guru agama dan membuat peserta tidak bosan atau jenuh dalam proses belajar mengajar. Di SMP Negeri 13 juga diadakan beberapa kegiatan keagamaan sehingga cukup memberikan banyak manfaat atau hasil bagi peserta didik itu sendiri, diantara hasil yang diperoleh oleh peserta didik dari terlaksananya beberapa kegiatan keagamaan yaitu: misalnya; dengan diadakannya wajib jama'ah dhuhur dan jum'at di mushalla yang ada di sekolah, maka peserta didik yang ada di SMP Negeri 13 sedikit demi sedikit dalam diri mereka telah tertanam pembiasaan shalat dengan berjama'ah, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan jama'ah dhuhur dan jum'at, walaupun tanpa adanya perintah terlebih dahulu dari guru agama peserta didik sudah berantusias mengikuti jama'ah dhuhur dan jum'at tersebut.

Sudarwan Danim menyatakan bahwa hasil (*output*) pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada

¹²⁵ Ibid, hlm. 53

peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler.¹²⁶

Dengan didukungnya mutu masukan dan mutu proses yang cukup baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa SMP Negeri 13 Malang ini dapat menghasilkan mutu lulusan yang baik pula. Hal ini dibuktikan dari siswa-siswi lulusan SMP Negeri 13 Malang sebagian besar banyak yang diterima di SMA Negeri unggulan dan bisa membaca al-qur'an. Peserta didik SMP Negeri 13 Malang juga menorehkan prestasi dalam bidang pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu: memperoleh juara kaligrafi arab, pidato bahasa arab, dan puisi rohani sekota Malang, Selain itu, peserta didik SMP Negeri 13 juga banyak yang memperoleh nilai diatas Standar Kelulusan Minimal (SKM) untuk bidang studi pendidikan agama Islam.

B. Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 13 Malang

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan, dengan tujuan utama ikut meningkatkan

¹²⁶ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 53-54

tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat.¹²⁷

Komite sekolah itu tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi komite sekolah itu tidak harus dibentuk untuk membiayai sekolah tersebut dan yang terpenting jika suatu daerah tergolong miskin bukan berarti tidak dapat terbentuk komite sekolah, sebab dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dengan berbagai cara dan tidak hanya dengan uang.

Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah yang menyangkut kelembagaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut

¹²⁷ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 47

kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* sekolah, dan membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Adapun pembentukan komite sekolah bertujuan sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi *transparan, akuntabel*, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹²⁸

Adapun peran yang dijalankan oleh komite sekolah yang ada di SMP Negeri 13 Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): komite SMP Negeri 13 Malang sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, melakukan pelebaran mushalla, pengadaan peralatan shalat (mukenah dan

¹²⁸ Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 48

sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

- b. Sebagai badan pendukung: peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan fikiran. Misalnya, setiap hari besar Islam komite sekolah selalu mempunyai andil dalam acara tersebut, dengan mengadakan lomba-lomba Islami, misalnya pidato, puisi kaligrafi, peragaan busana muslim, tartil dan qiro'ah, adzan, dll. Dalam rangka pengembangan fisik sekolah, komite sekolah juga ikut membantu dan mendukung dengan melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain komite sekolah membantu dalam masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, seperti dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru khususnya guru pendidikan agama Islam senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.

- c. Sebagai badan pengontrol, komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam. Misalnya, dalam hal keuangan, komite SMP Negeri 13 Malang setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah. selain itu, komite sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: penambahan buku-buku agama, dan kaset-kaset yang berhubungan dengan agama yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
- d. Sebagai badan mediator, komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai

masukannya bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat *akuntabel* (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 13 ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan, selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat *support* dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang ini adalah:

1. Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari segi *input*, proses dan *outputnya*. Dari segi *input*, siswa-siswi SMP Negeri 13 Malang mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri dalam berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, para guru, staf, TU, konselor dan administrator yang mempunyai keahlian dibidangnya dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dari segi proses, guru agama Islam di SMP Negeri 13 telah menggunakan metode pengajaran yang bervariasi sehingga membuat peserta didik lebih mudah memahami materi PAI. Adapun dari segi *outputnya*, siswa lulusannya sebagian besar diterima di SMA Negeri unggulan, rajin melaksanakan shalat dan bisa membaca Al-Qur'an.
2. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.
 - a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite SMP Negeri 13 Malang sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh

sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, melakukan pelebaran mushalla, pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung) dan rencana pembangunan laboratorium PAI. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

- b. Sebagai badan pendukung, peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.
- c. Sebagai badan pengontrol, komite sekolah di SMP Negeri 13 Malang melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan.
- d. Sebagai badan mediator, keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 13 ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat *support*

dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

B. Saran-saran

1. Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang, maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama, baik dengan guru pendidikan agama Islam, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan agama Islam.
2. Peran komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan agama Islam semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.
3. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Tim Dosen. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qur'an dan Terjemah*. 1989. Jakarta: Depag.
- Andayani, Dian dan Majid, Abdul. 2006. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi; Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Annisah. 2007. “*Peranan Komite Sekolah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata langkah penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2006. *Visi Baru Manajemen sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dirawat, dkk. 1983. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- FIP-IKIP Malang, Tim Dosen. 1981. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, Jilid II
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaeruddin, dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jogjakarta: Nuansa Aksara, Cet. II.
- Marno dan Supriyatno, Triyo. 2008. *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. 2007. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E, 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakterisrik, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Manajemen Barbasis Sekolah*. Bandung: PT. Rosda Karya. Cet. X.
- Nasution. 1991. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Nata, Abudin. 2001. *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Partanto, Pius A. dan Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prabowo, Sugeng Listyo. 2008. *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*. Malang: UIN Press.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*. 2008. Bandung: PT Refika Aditama.
- Roziqi, Abdul Rofiq. 2007. “*Strategi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shaleh, Abdul Rachman. 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa; Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- SK No. 044/U/2002, Kepmendiknas. *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subakir, Supriono dan Sapari Achmad. 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: Anggota IKAPI, Cabang Jatim.
- Sukirno, 2006. *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Widyamata.

- Sukmadinata, Nana Syaodih, Dkk. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan instrumen*. Bandung: Refika Aditama.
- Surya, Mochammad dan Djumhur. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV Ilmu.
- Suryadi, Ace. 1992. *Indikator mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Tilaar, dan Suryadi, Ace. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Umeidi, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-undang Republika Indonesia, No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yamin, Martinis. 2009. *Profesionalisme Guru Dan Implementasi KTSP*. Jakarta: Putra Grafika.
- Yulianti. 2007. "Strategi Pimpinan Madrasah Dalam Meningkatkan Peran Komite Madrasah DI MTsN Malang 1", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Malang.